

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin et al., 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

-----, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

Appraisal Institute, 2001, *The Appraisal of Real Estate*, Chicago, Appraisal Institute.

Dhru, Kelly A., 2010, *Acquisition of Land for 'Development' Projects in India: The Road Ahead, Research for Governance*, India.

Fuady, Munir, 2017, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Gergen, Ann E., 1993, *Why Fair Market Value Fails as Just Compensation*, Hamline J. Pub. L. & Pol'y.

Handoyo dan Hestu Cipto, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.

Harsono, Boedi, 2005, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Djambatan.

Hatta, Mohammad, 2005, *Hukum Tanah Nasional dalam Perspektif Negara Kesatuan*, Yogyakarta, Media Abadi.

Iskandar, Mudakir, 2007, *Dasar-Dasar Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Jakarta, Jala Permata.

Kitay, M. G., 1985, *Land Acquisition in Developing Countries: Policies and Procedures of the Public Sector*, Boston, Oelgeschlager, Gunn & Hain, Publishers, Inc.

Lemek, Jeremias, 2007, *Mencari Keadilan: Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Galang Press.

Limbong, Bernhard, 2012, *Hukum Agraria Nasional*, Jakarta, Margaretha Pustaka.

-----, 2015, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Jakarta, Margaretha Pustaka.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada

Media Group.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Muliawan, Jarot Widya, 2016, *Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Yogyakarta, Buku Litera.

Neuman, William Lawrence, 2000, *Social Research Methods, USA, Qualitative and Quantitative Approches*, Allyn & Bacon.

Nowak, John E., 1986, *Constitutional Law*, Little, Brown and Co., Boston, Toronto.

Rubaie, Achmad, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Malang, Banyumedia.

Salindeho, John, 1988, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika.

-----, 1994, *Manusia, Tanah, Hak dan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Salle, Aminuddin, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Yogyakarta, Kreasi Total Media.

Sitorus, Oloan, et al., 2004, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Yogyakarta, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.

Soejono et al., 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

Soemardi, Dedi, 1997, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Penerbit Indhillco.

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta.

Sumardjono, Maria S. W., 1994, *Antara Kepentingan Pembangunan dan Keadilan "Forum Diskusi Alternatif"*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.

Soetikno, Iman, 1990, *Agraria Nasional*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Stonem, Geoffrey R. et al., 1986, *Constitutional Law*, Little, Brown and Company, Boston, Toronto.

Sulaeman, Abdullah, 2010, *Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum*,

Jakarta, Jala Permata Aksara.

Sutedi, Adrian, 2007, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika.

Syah, Mudakir Iskandar, 2010, *Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Jakarta, Jala Permata Aksara.

Wignjodipoero, Soerojo, 1983, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung.

Yulis, Herma, 2000, *Aspek Hukum Hak Pakai Atas Tanah Negara Sebagai Objek Jaminan*, Jakarta, Hukum Bisnis.

Artikel Jurnal

Daniel B. Kelly, "The Public Use Requirement in Eminent Domain Law: A Rationale Based on Secret Purchases and Private Influence", *Cornell Law Review* 1, 2006.

Fennell, Lee Anne, "Taking Eminent Domain Apart", *MICH. ST. Law. Review*, 2004.

GG, Dekie, "Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum", *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, [S.l.], 2017.

Harrison, Gerald A. dan Keith A. Good, "Eminent Domain and Condemnation: The Taking of Private Property for Public Use in Indiana", *Historical Documents of the Purdue Cooperative Extension Service*, Paper 1058, 2015.

Hershman, Mendes, "Compensation - Just And Unjust: A Study in Eminent Domain", *The Business Lawyer*, Volume 21, Nomor 2, Januari 1966.

Koeswahyono, Imam, "Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan bagi Kepentingan Umum", *Jurnal Konstitusi*, Volume 1, Nomor 1, 2008.

Nurhardianto, Fajar, "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia", *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Volume 11, Nomor 1, 2015.

Orthner, Dale, "Toward a More Just Compensation in Eminent Domain", *McGeorge Law Review*, Volume 38, Nomor 2, 2016.

Suntoro, Agus, "Penilaian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Perspektif HAM", *Bhumi, Jurnal Agraria dan*

Pertanahan, Volume 5, Nomor 1, 2019.

Zarkasih, “Pelaksanaan Prinsip Keadilan dalam Pemberian Ganti Rugi Pengadaan Tanah (Studi Kasus Pelebaran Jalan Raya di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah)”, *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS*, 2015.

Skripsi

Dwiprasetya, Thio A., 2016, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bandara di Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Faizah, Lilis Nur, 2010, Perkembangan Konsep Kepentingan Umum dalam Pengambilalihan Hak Atas Tanah di Indonesia (1961-2006), Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sari, Daisyta Mega, 2014, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum: Studi Komparasi Indonesia dan India, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Gadjah Mada, Yogyakarta.

Disertasi

Ambaye, Daniel W., 2013, Land Rights and Expropriation in Ethiopia, Disertasi, Royal Institute of Technology, Stockholm.

Makalah

Sumardjono, Maria S. W., “Anatomi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Tinjauan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis”, Makalah, Seminar Nasional Mengulas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Relevansinya dengan Perkembangan Migas, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 28 Maret 2012.

Internet

Kamus Bisnis, “Eminent Domain”, <http://kamusbisnis.com/arti/eminent-domain/>, diakses 15 Januari 2018.

Fahry, Ahmad, “Cijago Tawar Murah Lahan 106 Warga Depok”, <https://www.radardepok.com/2018/08/cijago-tawar-murah-lahan-106-warga-depok/>, diakses tanggal 13 Juli 2020.

Julius, Dani, “Pembebasan Lahan KA Bandara YIA Ricuh, Ratusan Warga Tolak Ganti Rugi Lahan”, <https://regional.kompas.com/read/2019/11/07/15301351/pembebasan-lahan-ka-bandara-yia-ricuh-ratusan-warga-tolak-ganti-rugi-lahan?page=all>, diakses 13 Juli 2020.

Kabar Priangan, “Dinilai Merugikan, Warga Tolak Ganti Rugi Lahan Proyek Tol Cisumdawu”, <https://kabar-priangan.com/dinilai-merugikan-warga-tolak-ganti-rugi-lahan-proyek-tol-cisumdawu/>, diakses tanggal 13 Juli 2020.

Setia, Deliana, “Fenomena Holdout Problem dan Urban Sprawl pada Kota-kota di Indonesia”, <https://www.kompasiana.com/delianaseta/552b798b6ea834fa678b4567/fenomena-holdout-problem-dan-urban-sprawl-pada-kotakota-di-indonesia#:~:text=Lebih%20jauh%2C%20urban%20sprawl%20merupakan,wilayah%20pedesaan%20menjadi%20wilayah%20perkotaan.&text=Holdout%20problem%20merupakan%20bentuk%20kekuatan,muncul%20dalam%20proses%20pengumpulan%20lahan>, diakses tanggal 27 Juni 2020.

Sietra, Hery, “Pembebasan Lahan oleh Pemerintah, Antara Nilai NJOP dan Nilai Harga Pasar”, <http://www.hukum-hukum.com/2015/10/pembebasan-lahan-oleh-pemerintah-antara.html>, diakses tanggal 28 Oktober 2017.

Black’s Law Dictionary, 6th edition, 1990.

JUSTIA – UNITED STATES LAW. Situs Kasus *Inkracht* Amerika Serikat, <https://law.justia.com/>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak atas Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 288 Tahun 1961, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 2324).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280).

- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara.